

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Pembahasan dan Analisis

implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Kemudian George C. Edward berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumberdaya finansial.
3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.¹

Berdasarkan pada penjelasan diatas, sumber-sumber yang penting dalam implementasi kebijakan publik meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik dengan sebaik mungkin. Dibutuhkannya kerjasama antara pemerintah maupun Tim Koordinasi Bantuan selaku pelaksana dengan kelompok masyarakat dalam memaksimalkan penyaluran bantuan. Agar apa yang menjadi tujuan bersama dalam penanggulangan kemiskinan dengan cara pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi yang baik melalui BPNT ini terlaksana.

5.2 Implementasi BPNT di Kelurahan Pondok Pucung

Setelah data-data yang dibutuhkan sudah diperoleh dari hasil penelitian dan observasi lapangan, maka proses selanjutnya adalah analisis hasil penelitian. Dalam analisis hasil penelitian ini terdiri dari proses implementasi kebijakan dan hambatan. Yang mana proses keberhasilan implementasi kebijakan BPNT ini mengacu pada teori George C. Edward yang dipengaruhi dari empat variable, yaitu:

1. Komunikasi

yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang

¹ Subarsono, *Analisi Kebijakan Publik*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2011), h, 90-92

menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.²

Sejauh ini ketika pelaksanaan penyaluran BPNT yang bertransformasi dari bantuan yang sebelumnya adalah rastra/beras sejahtera yang disusun oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia ini sudah mengalami masa penelitian dan uji coba pelaksanaan sudah cukup lama, diawali pelaksanaan BPNT dari beberapa daerah yang sudah memungkinkan penerapannya, termasuk Kelurahan Pondok Pucung-Kota Tangerang Selatan.

Program BPNT ini digadang sebagai formulasi baru teknis pemberian bantuan berupa pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi yang baik dengan cara pengiriman uang elektronik, dari bank yang bekerja sama dengan Pemerintah Pusat pada program BPNT. Sebagai langkah kemudahan transisi program bantuan dari atas kebawah, juga memudahkan proses pengawasan dan evaluasi.

Sebagai langkah salah satu keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan komunikasi, kordinasi, dan sosialisai yang baik. Berdasarkan data-data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dan observasi lapangan, peneliti berpendapat bahwa dalam proses implementasi BPNT sudah sangat sejalan dengan apa yang disampaikan George C. Edward berkaitan komunikasi, dibuktikan dengan pandangan yang disampaikan seluruh informan baik dari Pemerintah, Tim Pelaksana, Pendamping, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Implementor diisi oleh petugas-petugas yang berkompeten dan memahami tugas yang harus diselesaikan pada implementasi BPNT, yang selanjutnya baik dari proses pelaksana

² Subarsono, *Analisi Kebijakan Publik*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2011), h, 90-92

dan penyaluran ataupun perubahan itu selalu dikoordinasikan dengan cepat dan tanggap.

2. Sumber daya

meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.³

Pada proses implementasi sebuah program dibutuhkan sumber daya yang baik demi berlangsungnya keberhasilan implementasi itu sendiri, berkaitan dengan sumberdaya peneliti memfokuskan penggalian data pada sumber daya manusia dan fasilitas.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat dinyatakan berkaitan dengan sumberdaya manusia sebagai implementor dalam BPNT ini, sudah diisi dengan petugas-petugas yang memiliki potensi baik dan fokus dalam pelaksanaan penyaluran BPNT. bukan hanya itu, pada sisi lain salah satu personalia juga lulusan sarjana sosial yaitu Bapak Saleh, S. Sos. Selaku staf Kesejahteraan Sosial Kelurahan Pondok Pucung, yang pada keilmuannya juga mendalami studi tentang kesejahteraan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Kemudian pada fasilitas, memang ditemukan beberapa hambatan, seperti persoalan gangguan jaringan pada mesin edisi namun masih bisa dikondisikan dengan cepat, permasalahan pada kartu ATM/KKS yang disebabkan oleh *Human error*, serta jangkaun jarak pengambilan bantuan yang terbilang cukup jauh dan kurang ramah bagi mereka yang lansia.

³ Subarsono, *Analisi Kebijakan Publik*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2011), h, 90-92

Maka dapat dinyatakan pada aspek sumberdaya dalam implementasi program BPNT ini sudah berlangsung baik namun belum maksimal, masih ditemukan beberapa hambatan atau kekurangan pada fasilitas penyaluran bantuan tersebut.

3. Disposisi

adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Berkaitan dengan karakteristik pelaksana, penggalian data bukan hanya dari pelaksana, namun juga dihimpun dari sudut pandang para KPM yang memang berhadapan langsung sebagai sasaran program, sebagai penguat pandangan sejauh mana sikap dan prespektif baik yg diemban oleh implementor dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan bersama untuk meringankan kebutuhan pangan dan gizi bagi mereka yang membutuhkan.

Dari data-data yang dikumpulkan dari hasil observasi dan wawancara lapangan berkaitan dengan disposisi implementasi BPNT, maka pernyataan yang didapat dari implementor dan juga pendamping bahwa tim pelaksana sudah menjalankan tugas dengan rasa tanggungjawab dan mengayomi juga mendampingi sebaik mungkin kepada para KPM untuk memudahkan akses menerima yang menjadi bagian dari haknya mereka, selanjutnya sudah jelas juga dan pasti sejalan dengan tujuan bersama pemerintah pusat sebagai satuan perangkat implementor dari program ini, yang berlandaskan pada pedoman umum BPNT.

Pada sumber sudut pandang yang berbeda juga disampaikan dari para KPM BPNT, yang menyatakan bahwa implementor dan pendamping sudah mendampingi sebaik mungkin, bahkan menggunakan sistem jemput bola yang dilakukan oleh implementor, juga disusun teknis yang berusaha memudahkan betul akses penerimaan bantuan bagi KPM, pada sisi lain implementor yaitu aspek eksternal seperti Perangkat Pemerintahan Umum, Pihak Keamanan TNI dan Polri turut serta juga mengisi tugas menjaga kondusifitas penyaluran bantuan.

Dari sekian pandangan yang disampaikan dari seluruh informan pada penelitian ini, maka dapat dinyatakan korelasi disposisi yang diharapkan sudah sesuai dan sejalan dengan teori yang disampaikan oleh George C. Edward, didasari karena karakteristik tim pelaksana memiliki sikap pelayanan yang baik, komitmen, dan tanggungjawab.

4. Struktrik Birokrasi

Struktur birokrasi pada implementasi kebijakan meliputi *Standard Operating Procedure* (SOP) dan struktur birokrasi, yang keduanya itu menjadi unsur yang krusial dalam langkah implementasi baik komponen mesin dalam kendaraan dan jalur kendaraan itu sendiri untuk mencapai tujuan. *Standard Operating Procedure* (SOP) menjadi pedoman umum mekanisme pelaksanaan sebagai dasar fundamental pelaksana dalam bertindak melaksanakan program kebijakan agar tidak keluar dari tujuan dan sasaran kebijakan. lalu berkaitan struktur birokrasi, struktur birokrasi yang dibuat diusahakan mengalami susunan yang sesederhana mungkin, dan tidak tersusun pembagian tugas terlalu banyak dan system yang berbelit, yang nantinya pada saat pelaksanaan sungguh akan mempersulit proses pengawasan dan implementasi kebijakan cenderung rumit.

Implementasi program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan pangan dan gizi yang baik yaitu BPNT, sudah dilakukan sosialisasi dan koordinasi baik jajaran Pemerintah Pusat dan Daerah serta Pendamping, begitu pula pada Perangkat Pemerintah Kelurahan khususnya Seksi Kesejahteraan Sosial dalam proses pendataan dan penyaluran.

Sejauh data-data yang dikumpulkan oleh peneliti baik wawancara atau dengan observasi lapangan, dan ditambahkan data-data yang memiliki kesinambungan dengan topik pembahasan meski dihimpun dari eksternal sebagai penguat dan keabsahan data dalam menghasikan pernyataan akhir.

Dari seluruh data-data yang terkumpul, maka dapat dipastikan bahwa Pihak pelaksana dan pendamping itu sudah berjalan sesuai dengan ketentuan pedoman umum BPNT yang dirilis oleh Menko PMK, mulai dari acuan baku pelaksanaan penyaluran, pendataan, pendampingan serta pembagian tugas, dan jumlah bantuan yang diterima setiap KPM juga sudah sesuai dengan Pedoman Umum

dari aspek sistem birokrasi, khususnya pada pola pendataan dibuat formulasi kesatuan data terpadu berbasis *website* dengan akun *user* yang langsung terkoneksi dengan Pemerintah Pusat, dengan maksud menciptakan sistem birokrasi yang tidak berbelit seperti pelayanan satu pintu dan cenderung untuk memudahkan proses pengawasan.

Maka dari seluruh penjelasan diatas, dapat ditarik pernyataan bahwa dalam proses implementasi program BPNT berkaitan dengan struktur birokrasi dapat dinyatakan sudah berjalan sejalan dengan teori George C. Edward dalam keberhasilan implementasi kebijakan yang mengusahakan kesederhanaan struktur birokrasi dan pemudahan pengawasan pelaksanaan program tersebut.

5.1 Hambatan Implementasi BPNT di Kelurahan Pondok Pucung

Hambatan dalam implementasi kebijakan pasti ada, meski sudah disusun sebaik mungkin dalam proses pelaksanaan dan pembagian tugas pokok dan fungsi bagi petugas pelaksana, pada tahap perencanaan sudah pasti merumuskan beberapa hal masalah atau hambatan yang akan terjadi. yang kemudian pada tahap itu juga, dirumuskan beberapa jawaban teknis dan pembagian kerja sebagai jawaban penyelesaian dari masalah yang memungkinkan akan terjadi itu. Namun pada lain hal juga memungkinkan masalah atau hambatan baru akan diketahui ketika proses implementasi itu berlangsung.

Begitu juga dengan implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini, mendasari dengan data-data yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dan observasi lapangan dari penyaluran BPNT. Maka dapat dinyatakan ada beberapa hambatan yang ditemukan dari proses implementasi BPNT ini, yang jika disederhanakan sebagai berikut:

1. Mentalitas ketergantungan bantuan sosial

Merujuk pada hasil wawancara yang disampaikan langsung oleh Bapak Dede Suhendi selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Fakir Miskin Dnas Sosial Kota Tangerang Selatan melalui percakapan virtual, beliau menyampaikan bahwa yang menjadi hambatan implementasi BPNT diantaranya adalah mentalitas ketergantungan bantuan sosial pada masyarakat, bahwa salah satu KPM dinyatakan sudah mampu dan tidak diperlukannya kembali bantuan sosial seperti BPNT, namun masih tetap terus mengharapkan menerima bantuan tersebut, karena memang tidak ada kemiskinan yang sifatnya “kemiskinan permanen”, sambung bapak dede suhendi.

2. Belum meratanya penyaluran bantuan bagi yang membutuhkan

Tidak dapat dipungkiri meski sudah diusahakan dengan segala formulasi dan kemudahan untuk pendataan dan yang lainnya, berupa pelayanan satu pintu dan pemanfaat perkembangan teknologi, namun masih ditemukan belum meratanya penerimaan manfaat dari BPNT, ini menjadi salah satu temuan di lapangan, bersesuaian dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Saleh, S. Sos. kSelaku Staf Kesejahteraan Sosial Kelurahan Pondok Pucung berkaitan dengan belum meratanya pemberian bantuan ini. Yang mana problematika ini bisan saja ditimbulkan dari pendataan yang kurang merata atau juga belum tersiapkannya formasi baru dari Pemerintah Pusat penerimaan bantuan bagi mereka yang belum mendapatkannya.

3. Keterbatasan informasi dan komunikasi penyaluran bantuan bagi KPM
4. Jarak tempuh pengambilan sembako yang terbilang cukup jauh